

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adiwinata, Saleh, 1984, *Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1 Cetakan Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Asikin, H. Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian (Cetakan VI)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Al Rasyid, Harun, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badudu, J. S, Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bidara, D., dan Martin P Bidara, 1984, *Ketentuan Perundang-undangan Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ke- I., Bandung: Mandar Maju.
- Chomzah, Ali Achmad, 2003, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid 2, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Harsono, Budi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Jakarta, Djambatan.
- Henry Campbell Black, 1993, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*. St. Paull, Mint: West Publishing Co.

- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. *et al*, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan III, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- J.B. Daliyo *et al.*, 2001, *Hukum Agraria I*, Cetakan 5, Jakarta: Prehallindo.
- Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P., 1991, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT*, Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Efendy, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali Press.
- Rudiyanto, Dr. Ir. Arifin, M.Sc *et al*, 2016, *Kajian Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia*, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan – Bappenas.
- R. Soeprapto, 1986, *Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Jakarta: CV. Mitra Sari.
- Ruchiyat, Eddy, 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Cetakan Kedua, Bandung: Armico.
- Suredi, Adrian, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta, Cipta Jaya.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar (Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penerbitan)*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Yang Bersifat Strategis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Sangadji, Z.A., 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Sumardjono, Maria S.W., “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah*”.

\_\_\_\_\_, 13 September 1997, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-Pajak yang terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya. Diselenggarakan atas Kerjasama FH UGM dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali

Tresna, R., 1993, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita

Utrecht, E. dan Djindang, Moh. Saleh, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Ichtiar Baru.

Wright, Warren L., Final Report on The Review of The Basic Agrarian Law 1960, TA Land Law Adviser International.

### **Jurnal**

Annisa Oktaviani P & Harjono, 2019, “Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)”, Volume 7 Nomor 1, Januari-April 2019, diakses 9 Maret 2020

Ardiles Eric Panget, 2013, “Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertipikat Hak Milik Ganda”, artikel pada Lex Administratum, Volume 1 Nomor 3., diakses 7 Juni 2020

Bayu Krisna Murti, *et.al*, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Kantor Untuk Membatalkan Sertipikat Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, Volume 2, Nomor 3, *Jurnal*, Diponegoro Law Journal diakses 8 Juli 2020

- Damar Ariadi, 2017, “Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi Nomor 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw)”, Volume IV Nomor 2, Jurnal Repertorium
- Inter-Parliamentary Union, 2016, *Human Rights: Handbook For Parliamentarian Nomor 26, Inter-Parliamentary Union – UNHR*, Geneva
- Indri Hadisiswati, 2014, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, AHKAM, Volume 2, Nomor 1
- Irene Eka Sihombing, 2008, “Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah”, Volume 2, Nomor 1, September, Jurnal Hukum Prioris
- Ni Wayan Pipit Paidawati dan I Nengah Suharta, 2016, “Sifat Pembuktian Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Jurnal Hukum, Volume 04, Nomor 1
- Muhammad Ali Akbar Hadiyono Loekito, Ana Silviana, Triyono, 2016, “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Yang Mengandung Cacat Formalitas Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 335/Pdt/2013/PT.Smg)”, Volume 5, Nomor 4, Jurnal, Diponegoro Law Journal, diakses 19 Mei 2020
- Sri Handayani, 2015, “Pendaftaran hak Atas Tanah Asal Letak C, Girik, dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah”, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II Nomor 2, diakses 9 Maret 2020
- Sunaryo Basuki, 2005, “Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah”, Makalah, Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti, diakses 4 Juni 2020
- Tasyah Azhari, Roesnastiti Prayitno, Widodo Suryandono, 2016, “Pembatalan Akta Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa Yang Memuat Klausul Pemberian Kuasa Mutlak Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 24 November 2015 Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Pbr)”, Jurnal Hukum Notaris
- Winda Agustini, 2018, “Peralihan Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Antara Debitur Awal Dengan Debitur Pengganti”, Volume 7 Nomor 1, Mei, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

### **Penulisan Hukum**

- Edy Suparyono, S.H., 2008, *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*, Tesis, FH Universitas Diponegoro Semarang

Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, 2019, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pologoro untuk Pendaftaran Hak Atas Tanah dengan Tanda Bukti Letter C di Kabupaten Magelang*, Tesis, FHUGM

Wasono, Dono Doto, 2013, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Skpt) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota Pontianak)*, Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak

Putu Ade Harriestha Martana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997*, Tesis, Universitas Udayana

### **Undang-Undang**

Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Nomor 2043

Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3632

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Nomor 59 tahun 1997, Tambahan Lembaran Nomor 3696, Penjelasan Pasal 32 Ayat 2

### **Website**

Adi M, "Letter C Atau Girik apakah Bukti kepemilikan yang Sah?",  
[https://pengacarafaisalnasution.com/2018/11/21/letter-c-atau-girik-  
apakah-bukti-kepemilikan-yang-sah/](https://pengacarafaisalnasution.com/2018/11/21/letter-c-atau-girik-<br/>apakah-bukti-kepemilikan-yang-sah/)

Devita Purnamasari, Irma, Status Tanah dengan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan,  
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5372c17274d7f/stat  
us-tanah-dengan-surat-keterangan-peralihan-penguasaan-lahan/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5372c17274d7f/stat<br/>us-tanah-dengan-surat-keterangan-peralihan-penguasaan-lahan/)

Hasanah, Sovia, "Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal dan Hak Gebruik",  
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e28281dd903/hak  
-ieigendom-i--hak-ierfpacht-i--hak-iopstal-i-dan-hak-igebruik-i](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e28281dd903/hak<br/>-ieigendom-i--hak-ierfpacht-i--hak-iopstal-i-dan-hak-igebruik-i)

Herawati, Erni, “Rechtsverwerking Dalam Hukum Tanah Nasional”,  
<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/27/rechtsverwerking-dalam-hukum-tanah-nasional/>

Kanisius, Petrus, Meneropong Pasal 33 UUD 1945 dan Pengelolaan SDA Berbasis Pemulihan Lingkungan,  
[https://www.kompasiana.com/pit\\_kanisius/55208a79a33311764646d0bb/meneropong-pasal-33-uud-1945-dan-pengelolaan-sda-berbasis-pemulihan-lingkungan](https://www.kompasiana.com/pit_kanisius/55208a79a33311764646d0bb/meneropong-pasal-33-uud-1945-dan-pengelolaan-sda-berbasis-pemulihan-lingkungan)

Rosari Melani Siahaan, Dahlia, 2010, “Penerbitan Sertipikat Hak Milik Yang Berasal Dari Alas Hak Surat Pernyataan Yang Kemudian Dinyatakan Palsu (Studi Kasus MA NOMOR 1339/K/Pdt/2009)”,  
<https://media.neliti.com/media/publications/13980-ID-penerbitan-sertipikat-hak-milik-yang-berasal-dari-alas-hak-surat-pernyataan-yang.pdf>

Tampubolon, Dalimunthe, “Cara Membatalkan Sertifikat Tanah Yang Diserobot Orang Lain”, <https://dntlawyers.com/cara-membatalkan-sertifikat-tanah-yang-diserobot-orang-lain/>

Tampubolon, Boris, “Hilangnya Hak Milik dan Hak Menuntut Atas Tanah Yang Ditelantarkan Pemilik?”, <https://konsultanhukum.web.id/hilangnya-hak-milik-dan-hak-menuntut-atas-tanah-yang-ditelantarkan-pemilik>

TD Achmad, Ady, “Surat Kuasa, Kunci Segala Pintu Masuk Beracara”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a22422100ece/surat-kuasa-kunci-segala-pintu-masuk-beracara/>